



Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Nilai Anti-Korupsi pada Generasi Muda

Handy Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis : andisetyawan@gmail.com

Abstract Corruption is a global issue that significantly impacts social, economic, and political aspects, particularly in developing countries like Indonesia. It undermines public trust in government institutions and contributes to social injustice, slowing economic growth and hindering overall welfare. This paper focuses on preventing corruption among the younger generation, highlighting key measures such as anti-corruption education in schools, the effective use of social media campaigns, and necessary reforms in law enforcement. By instilling values of integrity and responsibility early on, educational institutions can help shape future leaders who are prepared to combat corruption. Additionally, the effective use of social media platforms like Instagram, TikTok, and YouTube can engage the younger generation through creative and interactive content, fostering awareness and encouraging active participation in anti-corruption efforts. Reforming law enforcement to impose stricter penalties on corrupt individuals and providing protection for whistleblowers are crucial to creating a deterrent effect. Ultimately, a comprehensive approach involving education, technology, and legal reform can empower the younger generation to promote transparency and integrity, contributing to a corruption-free society and a stronger foundation for the nation's future.

Keywords: Corruption Prevention, Youth Engagement, Anti-Corruption Education, Social Media Campaigns

Abstrak Korupsi adalah masalah global yang berdampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan berkontribusi pada ketidakadilan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menghambat kesejahteraan secara keseluruhan. Makalah ini berfokus pada upaya pencegahan korupsi di kalangan generasi muda, menyoroti langkah-langkah kunci seperti pendidikan antikorupsi di sekolah, penggunaan media sosial yang efektif untuk kampanye, dan reformasi yang diperlukan dalam penegakan hukum. Dengan menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini, institusi pendidikan dapat membantu membentuk pemimpin masa depan yang siap untuk melawan korupsi. Selain itu, pemanfaatan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dapat menarik perhatian generasi muda melalui konten yang kreatif dan interaktif, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya antikorupsi. Reformasi penegakan hukum untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi serta perlindungan bagi pelapor sangat penting untuk menciptakan efek jera. Pada akhirnya, pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, teknologi, dan reformasi hukum dapat memberdayakan generasi muda untuk mempromosikan transparansi dan integritas, berkontribusi pada masyarakat yang bebas dari korupsi, dan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan bangsa.

Kata kunci: Pencegahan Korupsi, Keterlibatan Generasi Muda, Pendidikan Antikorupsi, Kampanye Media Sosial

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia, tidak peduli besar kecilnya. Di Indonesia sendiri, korupsi adalah salah satu masalah negara yang telah dihadapi selama bertahun-tahun. Korupsi itu sendiri seperti penyakit yang menggerogoti negara dari berbagai aspek kehidupan, seperti dari segi ekonomi, di mana korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi negara, atau di bidang sosial, di mana korupsi membuat kepercayaan masyarakat menurun, atau di bidang politik, di mana jabatan dapat dibeli, mengakibatkan

pemerintahan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak tepat untuk jabatannya. Dari contoh-contoh tersebut, sudah jelas bahwa korupsi adalah hal yang sangat berbahaya.

Berdasarkan artikel dari Kompas, IPK di angka 34 membuat peringkat/rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara. Dari data tersebut, terlihat bahwa korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, dan malah meningkat. Hal ini terjadi karena budaya korupsi sudah sangat menjalar di kehidupan masyarakat itu sendiri. Selain itu, penegakan hukum di Indonesia tidak memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku. Sebagai contoh, pada artikel Kompas tentang pelaku korupsi timah, Toni Ismail baru-baru ini divonis dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda hanya Rp5.000.

Kasus tersebut tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan, tetapi juga membuat masyarakat termotivasi untuk melakukan korupsi karena hukumannya yang ringan. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi seringkali berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan, yang menyebabkan mereka merasa kebal terhadap hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat, di mana masyarakat biasa harus menghadapi konsekuensi yang lebih berat untuk tindakan yang lebih ringan. Ketidakadilan ini memperburuk situasi dan semakin mengikis rasa kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Korupsi itu sendiri tidak hanya berupa kejahatan-kejahatan yang berputar sekitar penggelapan uang dan menyuap orang untuk kepentingan sendiri, tetapi juga hal-hal mudah seperti mencontek saat ujian dan datang terlambat ke sekolah, yang termasuk bentuk korupsi akademis dan waktu. Dari sini bisa dilihat bahwa sekolah memiliki peran penting untuk mencegah sikap korupsi di generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa berikutnya. Penting untuk menyadari bahwa perilaku korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil dan jika tidak ditangani, dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar dan lebih merusak.

Keluarga juga menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak agar tidak melakukan tindakan korupsi. Bentuk, isi, serta cara-cara pendidikan dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Keluarga yang anti terhadap tindakan korupsi akan mempermudah melenyapkan sikap korupsi dan membuat generasi muda lebih kebal jika dihadapkan dengan skenario tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dalam setiap keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran tentang kejujuran dan integritas. Keluarga yang

memiliki nilai-nilai ini akan lebih mampu membentuk karakter anak dan membekali mereka dengan ketahanan terhadap godaan untuk berperilaku korup.

Selain pendidikan formal, peran masyarakat dalam membentuk sikap anti-korupsi juga sangat penting. Masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan norma dan nilai yang menentang praktik korupsi. Melalui diskusi, seminar, dan berbagai kegiatan sosial lainnya, masyarakat bisa bersama-sama menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi akan membuat generasi muda merasa lebih bertanggung jawab dan terlibat dalam perubahan. Komunitas yang aktif dan peduli akan mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen perubahan yang nyata.

Dukungan dari pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam membangun budaya anti-korupsi. Kebijakan yang tegas serta pelaksanaan program-program pendidikan anti-korupsi harus menjadi bagian dari agenda nasional. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan terencana, mencakup semua lapisan masyarakat. Ini akan menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi dan memberikan kepercayaan kepada generasi muda bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Ketika pemerintah berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam melaporkan tindakan korupsi.

Dengan menciptakan lingkungan yang sehat, jujur, dan terbuka, kita dapat mengubah cara pandang generasi muda terhadap korupsi dan memberikan mereka alat yang diperlukan untuk melawan praktik yang merusak ini. Kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berkomitmen pada nilai-nilai tersebut.

Permasalahan

1. Bagaimana cara mengurangi tindakan korupsi di generasi muda?
2. Apa yang membuat tindakan korupsi masih sering dilakukan walaupun sudah dilakukan pencegahannya?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara untuk memahami permasalahan dan tindakan pencegahan korupsi di kalangan generasi muda. Wawancara dipilih karena dapat memberikan informasi mendalam, detail, serta persepsi, pengalaman, dan tindakan narasumber. Wawancara bersifat semi-formal dengan pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memberi keleluasaan bagi narasumber untuk menjawab berdasarkan pengalaman pribadi. Narasumber yang dipilih adalah mahasiswa Universitas Bandar Lampung, mengingat peran penting generasi muda dalam masa depan bangsa dan potensinya dalam membawa perubahan serta berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa dipilih karena mereka umumnya memiliki akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesempatan untuk terlibat dalam gerakan sosial, sehingga pandangan mereka dapat memberikan wawasan berharga bagi penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara mengurangi tindakan korupsi di generasi muda

1. Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah

Pendidikan merupakan wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendidikan, seseorang dapat membentuk karakter mereka. Barli Mahbubi, dari Kompas, menulis bahwa pendidikan anti-korupsi merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang jujur, transparan, dan berintegritas. Dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini, kita dapat membentuk karakter generasi muda yang kuat dan siap melawan praktik korupsi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2019, yang tertulis: “Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran dan pembentukan perilaku yang diselenggarakan pada perguruan tinggi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.” Materi pelajaran yang menarik, seperti cerita, drama, atau permainan, dapat membantu siswa lebih memahami konsep tersebut.

Materi yang disampaikan bisa berupa pemahaman hukum-hukum pidana kasus korupsi, seperti Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pada pasal ini diatur jenis kejahatan melawan hukum berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi. Tindakan memperkaya diri ini dilakukan dengan cara merugikan negara atau

perekonomian negara. Bagi siapa pun yang melakukan tindakan ini, maka akan dipenjara dengan tiga pilihan, yaitu: penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, hukumannya juga berupa denda. Jumlah denda yang akan diajukan paling sedikit dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) atau paling banyak denda sebesar satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000).

Selain materi pendidikan, guru dan orang tua memiliki peran penting dalam memberi contoh nyata tentang kejujuran. Guru-guru yang jujur dalam menilai hasil belajar siswa, dan orang tua yang menunjukkan kejujuran dalam tindakan sehari-hari, akan menjadi contoh yang dapat ditiru anak-anak. Penting bagi anak-anak untuk melihat bahwa integritas bukan hanya teori, tetapi juga sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari pendidikan antikorupsi, siswa dapat diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan diskusi, debat, atau lomba terkait tema integritas dan antikorupsi. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini dan menanamkan kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi.

Pendidikan antikorupsi juga harus melibatkan teknologi digital yang lebih dekat dengan keseharian siswa saat ini. Pengembangan aplikasi edukatif, game interaktif, atau simulasi berbasis teknologi yang menggambarkan efek buruk dari korupsi bisa menjadi metode menarik untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi. Siswa yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran berbasis teknologi ini akan lebih memahami pentingnya menolak korupsi di masa depan. Selain itu, platform digital juga dapat digunakan untuk membuat kampanye antikorupsi yang dapat diakses oleh lebih banyak generasi muda.

Dalam jangka panjang, pendidikan antikorupsi ini dapat membantu mencegah sikap apatis terhadap tindakan korupsi. Generasi muda yang terpapar pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan sejak dini cenderung akan menghindari perilaku koruptif ketika mereka dewasa, karena mereka telah terbiasa dengan norma-norma moral yang kuat.

Dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk generasi yang lebih peka terhadap praktik korupsi dan lebih berkomitmen pada kejujuran. Tindakan ini harus menjadi prioritas di sekolah-sekolah dan rumah-rumah agar nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam diri setiap anak.

2. Menggunakan Media Sosial dan Sarana Lainnya untuk Mempromosikan Budaya Anti-Korupsi

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang yang begitu pesat, terutama pada sektor informasi, membuat masyarakat dengan mudah menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Kemudahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan menggunakan media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube dapat digunakan untuk mengkampanyekan pesan-pesan antikorupsi dengan cara yang menarik dan interaktif. Kampanye antikorupsi yang kreatif, misalnya melalui video pendek, meme, infografis, atau bahkan tantangan viral, dapat menarik perhatian generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan interaksi langsung antara kampanye antikorupsi dan generasi muda. Misalnya, diskusi online atau sesi tanya jawab dengan tokoh-tokoh antikorupsi bisa diadakan melalui platform ini. Generasi muda bisa bertanya, berdiskusi, atau memberikan pandangan mereka mengenai isu-isu korupsi, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam gerakan tersebut. Partisipasi aktif seperti ini akan membantu mereka memahami isu tersebut dengan lebih baik dan merasa memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam pencegahan korupsi.

Penggunaan media sosial juga memungkinkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan dengan cara mereka sendiri. Mereka bisa membagikan konten kampanye antikorupsi kepada teman-teman mereka atau bahkan membuat konten mereka sendiri yang mendukung gerakan antikorupsi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan pesan, tetapi juga untuk menciptakan komunitas yang peduli terhadap isu korupsi. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam gerakan ini, semakin besar pengaruh yang dapat tercipta dalam melawan praktik korupsi di berbagai sektor.

Media sosial juga memberikan kesempatan untuk menciptakan kolaborasi lintas negara dalam memerangi korupsi. Melalui internet, generasi muda dari berbagai negara dapat belajar satu sama lain tentang langkah-langkah efektif yang dilakukan di negara lain dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat membuka wawasan dan memungkinkan berbagi strategi serta pendekatan inovatif yang lebih global. Kampanye antikorupsi lintas negara juga dapat memperkuat solidaritas global dalam melawan korupsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran internasional tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Selain media sosial, sarana lain seperti film dokumenter, seminar, atau acara televisi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya anti-korupsi. Konten-konten edukatif yang mengungkapkan dampak buruk dari korupsi bisa menarik perhatian publik dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsekuensi jangka panjang dari perilaku tersebut. Acara-acara diskusi televisi atau radio juga bisa menjadi sarana penting untuk memperluas cakupan informasi mengenai pentingnya pemberantasan korupsi, khususnya di kalangan anak muda yang mungkin lebih banyak mengakses informasi melalui media hiburan.

Dalam upaya memperkuat gerakan antikorupsi, pemanfaatan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di media sosial juga sangat strategis. Ketika para influencer menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan-pesan tentang integritas dan kejujuran, pengaruh mereka dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Pendekatan ini dapat menciptakan efek domino, di mana satu pesan positif dapat menyebar luas dan memicu lebih banyak tindakan kolektif dari masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah juga dapat membantu memperkuat kampanye anti-korupsi yang dijalankan.

Lebih jauh lagi, perluasan penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile yang fokus pada laporan tindak pidana korupsi dapat membuat pelaporan lebih mudah dan aman bagi masyarakat. Aplikasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang tindakan korupsi yang harus dilaporkan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengguna untuk berdiskusi dan bertanya seputar isu-isu terkait. Dengan akses yang mudah, generasi muda dapat lebih aktif terlibat dalam melawan korupsi dengan cara yang aman dan efisien.

Dalam jangka panjang, kombinasi antara media sosial dan sarana lainnya dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya memberantas korupsi. Dengan memanfaatkan platform digital yang kreatif dan sarana konvensional, gerakan antikorupsi bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari generasi muda hingga generasi yang lebih tua. Semua ini akan mendukung upaya bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Dalam upaya membangun budaya anti-korupsi, keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, terutama generasi muda, akan menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang signifikan.

3. Reformasi Penegak Hukum

Kita sudah sering kali melihat bagaimana koruptor-koruptor diberikan hukuman yang ringan, padahal mereka telah sangat merugikan negara dibandingkan dengan mereka yang ditahan atas kasus yang lebih ringan secara kriminalitas. Padahal, setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi di badan penegak hukum agar hal tersebut tidak terjadi lagi karena tindakan tersebut hanya akan melestarikan budaya korupsi.

Reformasi penegak hukum juga harus mencakup pemberian hukuman yang tegas dan proporsional terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang ringan atau bahkan pembebasan terhadap pelaku korupsi dapat menciptakan persepsi bahwa korupsi tidak membawa konsekuensi serius, sehingga generasi muda mungkin menganggap tindakan ini sebagai sesuatu yang "biasa saja" atau bahkan "menguntungkan." Sebaliknya, hukuman yang keras dan nyata bagi pelaku korupsi akan memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi generasi muda bahwa tindakan korupsi akan merugikan diri sendiri dan merusak masa depan mereka.

Reformasi penegak hukum juga perlu didukung oleh pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat yang memiliki integritas tinggi dan dilengkapi dengan pengetahuan tentang hukum serta nilai-nilai etika yang kuat akan menjadi pilar dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui reformasi ini, para penegak hukum dapat menjadi contoh bagi generasi muda tentang pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sekaligus mendorong mereka untuk tidak terlibat dalam praktik koruptif di masa depan.

Sistem hukum yang tegas dan adil tidak hanya akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, tetapi juga akan menjadi landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperkuat integritas lembaga penegak hukum serta memastikan bahwa aparat hukum memiliki etika yang tinggi dan tidak terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya integritas dan transparansi harus menjadi prioritas untuk menciptakan sistem yang bersih dari korupsi.

Di samping itu, pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hukum juga dapat menjadi solusi untuk menghindari intervensi dari pihak-

pihak yang berkepentingan. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk memantau, mengaudit, dan menindak segala bentuk penyelewengan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus korupsi. Transparansi dalam proses penegakan hukum harus dijamin, agar masyarakat dapat melihat bahwa tindakan korupsi ditindak secara serius, tanpa pandang bulu.

Reformasi penegak hukum juga perlu didukung oleh pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat yang memiliki integritas tinggi dan dilengkapi dengan pengetahuan tentang hukum serta nilai-nilai etika yang kuat akan menjadi pilar dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui reformasi ini, para penegak hukum dapat menjadi contoh bagi generasi muda tentang pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sekaligus mendorong mereka untuk tidak terlibat dalam praktik koruptif di masa depan.

Hal yang membuat korupsi masih dilakukan meski sudah ada upaya pencegahannya

Korupsi masih menjadi permasalahan serius di banyak negara meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindakan korupsi terus terjadi, meskipun kebijakan dan regulasi telah dibuat untuk meminimalisirnya. Salah satu faktor utamanya adalah lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kurang tegas. Pelaku korupsi sering kali merasa tidak ada konsekuensi yang berat atau bahkan bisa lolos dari hukuman. Jika penegakan hukum tidak dijalankan secara adil dan konsisten, tindakan korupsi akan sulit diberantas, dan oknum yang terlibat akan merasa aman untuk terus melakukannya.

Selain itu, budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat juga menjadi penyebab utama. Di beberapa tempat, korupsi bahkan dianggap sebagai "hal yang biasa" atau "cara cepat" untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam lingkungan yang memiliki struktur kekuasaan yang tidak transparan. Ketika korupsi dianggap normal, maka akan sangat sulit untuk mengubah perilaku tersebut, meskipun sudah ada aturan yang melarangnya. Budaya ini menciptakan sistem yang memperkuat praktik korupsi, di mana pejabat yang terlibat tidak merasa bersalah, bahkan merasa itu sebagai bagian dari pekerjaan mereka.

Faktor ekonomi juga turut berperan dalam mendorong tindakan korupsi. Di negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, individu yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya sering kali tergoda untuk melakukan tindakan korupsi demi bertahan hidup atau meningkatkan status ekonomi mereka. Ditambah dengan rendahnya gaji pejabat publik, ada insentif untuk menyalahgunakan wewenang demi mendapatkan keuntungan tambahan. Hal ini

menjadi tantangan besar, terutama ketika reformasi ekonomi dan kesejahteraan masih belum sepenuhnya terwujud.

Mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak korupsi merupakan langkah penting dalam pencegahan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang mudah diakses dan melindungi pelapor dari ancaman atau intimidasi. Mekanisme pelaporan ini harus didukung dengan jaminan keamanan bagi pelapor agar mereka tidak merasa takut untuk berbicara. Sistem whistleblower yang efektif akan sangat membantu dalam mengidentifikasi kasus korupsi yang tersembunyi, tetapi tanpa perlindungan yang memadai, orang akan ragu untuk melaporkan kejahatan tersebut karena khawatir dengan konsekuensi pribadi yang mungkin mereka hadapi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi adalah masalah mendalam yang berdampak pada aspek-aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan melalui serangkaian upaya yang komprehensif. Pendidikan anti-korupsi di sekolah harus menjadi prioritas utama, di mana nilai-nilai kejujuran dan integritas ditanamkan sejak dini. Penggunaan media sosial juga sangat efektif untuk menyebarkan kampanye anti-korupsi, dengan platform seperti Instagram dan TikTok menarik perhatian generasi muda melalui konten kreatif dan interaktif, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Reformasi penegakan hukum menjadi langkah penting dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi, dengan hukuman yang tegas dan adil untuk membangun kepercayaan generasi muda pada sistem hukum. Selain itu, sistem pelaporan yang aman dan perlindungan bagi pelapor perlu diperkuat agar masyarakat merasa nyaman saat melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan intimidasi. Secara keseluruhan, semua elemen masyarakat, pendidikan, media, pemerintah, dan keluarga harus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang baik, sehingga diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya menyadari bahaya korupsi, tetapi juga aktif dalam memberantas praktik tersebut, membangun masa depan yang lebih baik dan transparan bagi bangsa.

Saran

Dari penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat pendidikan antikorupsi tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekolah harus mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai kejujuran dan integritas ke dalam kurikulum formal, sementara keluarga perlu menjadi contoh yang baik dalam menerapkan perilaku jujur. Selain itu, kampanye melalui media sosial harus lebih aktif dengan memanfaatkan konten interaktif yang menarik bagi generasi muda, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga agen perubahan yang proaktif. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara tegas dan transparan, sehingga dapat memberikan efek jera yang nyata serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375-380.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Hasan, Z., Setiawan, D., Dinata, A. B., Adnus, E., & Gaol, A. A. L. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224-243.
- Mahbubi, Barli. Peran Pendidikan Anti-Korupsi Dalam Mambangun Generasi Muda Yang Bersih Dan Berintegritas
- Martiar, Norbetus Arya Dwingga. Saat Kerugian Kasus Timah Rp 300 Triliun dan Toni Tamsil Hanya Diminta Bayar Rp 5.000
- Pertiwi, Nilam Dwi Citra. Korupsi di Indonesia: Upaya Pencegahan dan Penindakan
- Putri, Dewinta. Undang-undang Tentang Korupsi Dan Hukumannya Di Indonesia
- Sherly, Adam. Peranan keluarga dalam pemberantasan dan penanggulangan korupsi
- Ulya, Fikal Nurul. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin
- UU Nomor 33 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi